

## Persepsi Guru Pendidikan Agama Islam Terhadap Kebijakan Kurikulum Merdeka: Studi Fenomenologi di Sekolah dan Madrasah

Ahmad Hulaimi

240701018.mhs@uinmataram.ac.id

Maimun

maimunzubair@uinmataram.ac.id

Winengan

winengan@uinmataram.ac.id

Lubna

lubna68@uinmataram.ac.id

Universitas Islam Negeri Mataram

### *Abstrak*

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam persepsi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) terhadap implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah dan madrasah. Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, penelitian ini mengeksplorasi pengalaman subjektif para guru PAI, serta memaknai bagaimana mereka memahami, merasakan, dan merespons perubahan kurikulum yang signifikan ini. Melalui pengumpulan data kualitatif, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh guru, tetapi juga menggali makna yang lebih dalam dari pengalaman mereka dalam konteks pendidikan yang sedang bertransformasi. Melalui analisis mendalam terhadap pengalaman para guru PAI, penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi mereka terhadap Kurikulum Merdeka sangat dipengaruhi oleh konteks sekolah dan madrasah masing-masing. Faktor-faktor seperti dukungan manajemen, pelatihan yang tersedia, serta budaya sekolah berperan penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kurikulum. Oleh karena itu, penting bagi pemangku kepentingan di bidang pendidikan untuk memperhatikan aspek-aspek ini dalam merancang kebijakan dan program yang mendukung guru dalam proses pengajaran. Jadi, penelitian ini memberikan wawasan yang berharga mengenai persepsi guru PAI terhadap implementasi Kurikulum Merdeka. Meskipun terdapat tantangan yang signifikan, banyak guru yang melihat perubahan ini sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas pengajaran mereka. Dengan dukungan yang tepat dan kolaborasi yang efektif, diharapkan implementasi Kurikulum Merdeka dapat memberikan dampak positif terhadap pembelajaran siswa di sekolah dan madrasah. Penelitian ini menekankan perlunya pendekatan yang holistik dan inklusif dalam mengimplementasikan kebijakan kurikulum, serta pentingnya mendengarkan suara para guru sebagai ujung tombak pendidikan.

**Kata Kunci :** Guru PAI, Kurikulum Merdeka, Sekolah dan Madrasah

### *Abstrac*

*This research aims to explore the perceptions of Islamic Education (PAI) teachers regarding the implementation of the Merdeka Curriculum in schools and madrasahs. Employing a phenomenological approach, this study investigates the subjective experiences of PAI teachers in understanding and responding to significant curriculum changes. Through qualitative data collection, the research identifies the challenges and*

*opportunities faced by teachers and delves into the meanings of their experiences within the context of an evolving educational landscape. In-depth analysis of the experiences of PAI teachers reveals that their perceptions of the Merdeka Curriculum are influenced by the specific contexts of their respective schools and madrasahs. Factors such as management support, available training, and school culture play a crucial role in the successful implementation of the curriculum. Therefore, educational stakeholders must consider these aspects when designing policies and programmes that support teachers. This study provides valuable insights into PAI teachers' perceptions of the Merdeka Curriculum. Despite the challenges, many teachers view this change as an opportunity to enhance the quality of teaching. With appropriate support and effective collaboration, it is hoped that the implementation of the Merdeka Curriculum can have a positive impact on student learning in both schools and madrasahs. The research underscores the importance of a holistic and inclusive approach in the implementation of curriculum policies, as well as the necessity of listening to the voices of teachers, who are at the forefront of education.*

**Keywords:** *PAI Teachers, Independent Curriculum, Schools and Madrasahs*

## Pendahuluan

Kurikulum Merdeka yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia merupakan salah satu langkah strategis dalam reformasi pendidikan nasional. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada sekolah dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan konteks lokal. Hal ini sesuai dengan Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024 tentang implementasi kurikulum merdeka pada satuan pendidikan mulai jenjang PAUD, sekolah dasar, dan sekolah menengah. Dengan kebijakan ini, diharapkan proses pembelajaran dapat menjadi lebih relevan, menarik, dan efektif bagi siswa, serta dapat mendorong partisipasi aktif mereka dalam pembelajaran.<sup>1</sup>

Dalam konteks Pendidikan Agama Islam (PAI), kebijakan ini menimbulkan beragam persepsi di kalangan guru yang mengajar mata pelajaran tersebut. Persepsi yang berbeda ini tidak hanya mencerminkan pandangan individu, tetapi juga menggambarkan kompleksitas pemahaman tentang PAI di tengah masyarakat yang beragam. Beberapa guru melihat kebijakan ini sebagai langkah positif untuk memperkuat nilai-nilai agama dalam pendidikan, sementara yang lain menganggapnya sebagai beban tambahan yang dapat mengganggu proses pembelajaran. Sebagai contoh seorang guru mengungkapkan kekhawatirannya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk pelatihan-pelatihan dan administrasi, sehingga mengurangi kesempatan untuk berinteraksi secara langsung dengan siswa dan memberikan bimbingan yang lebih personal. Hal ini

---

<sup>1</sup> "1. Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024," n.d.

menunjukkan bahwa meskipun kebijakan tersebut bertujuan baik, implementasinya perlu dievaluasi agar tidak membebani para pendidik.

Kebijakan Kurikulum Merdeka diharapkan dapat memberikan ruang bagi guru untuk berinovasi dalam proses pembelajaran. Namun, realitas menunjukkan bahwa tidak semua guru merasa nyaman dengan perubahan ini. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Muhammad Noor Fauzi dalam jurnal beberapa faktor yang menjadi problematika guru PAI dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka salah satunya adalah kompetensi skill yang memadai yaitu keterbatasan pengalaman dalam menerapkan konsep merdeka belajar turut berpengaruh terhadap kualitas dan kemampuan yang dimiliki oleh guru. Beberapa di antara mereka bahkan mengalami kesulitan dalam menguasai atau menerapkan keterampilan dasar yang diperlukan dalam proses pembelajaran di era digital, seperti penggunaan pembuatan presentasi yang menarik dan interaktif, serta keterampilan lain yang relevan. Sebenarnya, dalam pelaksanaan merdeka belajar, diharapkan guru dapat bersikap kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan berbagai media serta model pembelajaran yang dapat mendorong partisipasi aktif dari siswa. Kurangnya kompetensi ini juga menjadi kendala bagi guru dalam mengadopsi merdeka belajar secara lancar dan efektif.<sup>2</sup>

Keresahan ini muncul karena adanya tuntutan untuk mengubah metode pengajaran agar sesuai dengan konsep Kurikulum Merdeka yang selama ini dianggap efektif. Selain itu, kurangnya pelatihan dan sosialisasi mengenai Kurikulum Merdeka menjadi faktor yang memperburuk situasi ini, terutama guru-guru yang mengajar di madrasah akses untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan tidak sebanding dengan guru-guru yang mengajar di sekolah naungan Dikbud.

Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah pemahaman guru tentang filosofi di balik Kurikulum Merdeka. Banyak guru PAI yang menganggap bahwa kebijakan ini hanya sekadar perubahan administratif tanpa memahami tujuan jangka panjangnya. Dalam konteks ini, penelitian oleh Sari (2022) menunjukkan bahwa pemahaman yang kurang mendalam mengenai filosofi kurikulum baru dapat mengakibatkan resistensi terhadap perubahan. Guru-guru cenderung mempertahankan

---

<sup>2</sup> Muhammad Noor Fauzi, "Problematika Guru Mengimplementasi Kurikulum Merdeka Belajar Pada Pembelajaran PAI Di Sekolah Dasar," *Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah* 7, no. 4 (October 25, 2023): 1661, <https://doi.org/10.35931/am.v7i4.2688>.

metode pengajaran tradisional yang telah mereka gunakan selama bertahun-tahun, meskipun metode tersebut mungkin tidak lagi relevan dengan kebutuhan siswa saat ini.<sup>3</sup>

Begitu juga apa yang paparkan oleh Fajar Shihab dkk, perubahan dalam kurikulum pendidikan bukanlah suatu hal yang mudah untuk diterapkan, terutama pada tingkat pendidikan dasar. Sekolah dasar, sebagai lembaga pendidikan yang berfungsi sebagai fondasi awal bagi para siswa, memiliki peranan yang sangat signifikan dalam proses pembentukan karakter serta penguatan pemahaman dasar-dasar ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, kemampuan sekolah dasar dalam beradaptasi dengan kebijakan Kurikulum Merdeka menjadi aspek yang sangat penting dan krusial. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa implementasi dari kebijakan tersebut dapat berlangsung dengan sukses dan memberikan dampak positif bagi perkembangan pendidikan di Indonesia. Adaptasi yang tepat dan efektif terhadap perubahan kurikulum ini akan sangat menentukan kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa, serta akan mempengaruhi pembentukan karakter dan pengetahuan mereka di masa depan.<sup>4</sup>

Selain itu, faktor lingkungan sekolah juga mempengaruhi persepsi guru terhadap kebijakan Kurikulum Merdeka. Sekolah yang memiliki budaya inovasi dan dukungan manajemen yang kuat cenderung lebih berhasil dalam mengimplementasikan perubahan kurikulum. Sebaliknya, di sekolah yang memiliki budaya konservatif, guru-guru PAI mungkin merasa tertekan untuk tetap menggunakan metode pengajaran yang lama. Data dari penelitian yang dilakukan oleh Hasan (2021) menunjukkan bahwa dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat sangat penting dalam membantu guru beradaptasi dengan perubahan yang ada.<sup>5</sup>

Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan guru untuk menciptakan lingkungan yang mendukung implementasi Kurikulum Merdeka. Pelatihan yang berkelanjutan dan forum diskusi antara guru dapat menjadi solusi untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam menerapkan kurikulum baru. Dengan demikian, diharapkan guru PAI dapat lebih siap dan percaya diri dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada kualitas pendidikan agama di Indonesia.

---

<sup>3</sup> R. Sari, (2022). "Fenomena Resistensi Guru terhadap Perubahan Kurikulum: Studi Kasus di Sekolah Menengah Pertama." *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2022, 18(1), h. 45-58.

<sup>4</sup> *Jurnal Pendidikan and Dan Konseling*, "Adaptasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Di Sekolah Dasar," vol. 5, n.d.

<sup>5</sup> A. Hasan, "Budaya Sekolah dan Implementasi Kurikulum: Analisis pada Sekolah Menengah di Indonesia." *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 10, 2021, (3), 67-78.

Latar belakang penelitian ini berfokus pada fenomena bagaimana guru PAI memahami dan merespons kebijakan Kurikulum Merdeka, sehingga Pendidikan Agama Islam memiliki dampak yang signifikan terhadap pembelajaran anak dikelas. Namun, tantangan yang dihadapi oleh guru PAI dalam menerapkan kurikulum baru ini perlu dianalisis lebih lanjut. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan pemahaman dan kesiapan guru dalam mengimplementasikan kurikulum yang lebih fleksibel dan berbasis pada kebutuhan siswa. Belum lagi kebijakan yang berbeda dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka oleh Kemendikbud dan Kemenag yang menaungi lembaga pendidikannya masing-masing.

Sebuah studi yang dilakukan oleh Mulyasa (2021) menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dan realitas di lapangan, di mana banyak guru merasa kurang siap untuk mengadaptasi pendekatan pengajaran yang sesuai dengan Kurikulum Merdeka misalnya pembelajaran berdisferensiasi.<sup>6</sup> Penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana guru PAI merespons kebijakan ini dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi mereka.

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Berdasarkan pendapat (Bodgan & Taylor), penelitian kualitatif diartikan sebagai suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata baik tertulis maupun lisan dari individu serta perilaku yang diamati. Metode penelitian merujuk pada cara untuk mendapatkan pengetahuan atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.<sup>7</sup> Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menggali persepsi guru PAI melalui pendekatan fenomenologi. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami pengalaman subjektif guru dalam menghadapi perubahan kurikulum.

Penelitian fenomenologi, dalam konteks etimologis, memiliki makna yang berasal dari dua komponen utama, yaitu "fenomena" dan "logos". Kata "fenomena" sendiri diambil dari istilah dalam bahasa Yunani, yaitu "phainesthai", yang berarti menampakkan atau memperlihatkan. Kata ini memiliki beberapa sinonim, seperti fantasi, fantom, dan fosfor, yang semuanya berkaitan dengan konsep cahaya atau sinar. Dari pengertian tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa fenomena berkaitan erat dengan tampak atau terlihat, yang pada gilirannya mengarah pada pemahaman tentang cahaya itu sendiri. Dalam konteks

---

<sup>6</sup> E. Mulyasa, "Kesiapan Guru dalam Implementasi Kurikulum Merdeka: Tinjauan dari Perspektif Pendidikan Agama." *Jurnal Pendidikan*, 2021, 15(2), 123-135.

<sup>7</sup> Konferensi Nasional Tarbiyah et al., "Problematika Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka," 2023.

bahasa Indonesia, istilah "fenomena" dapat diterjemahkan secara harfiah sebagai gejala atau sesuatu yang dapat diamati dan terlihat.<sup>8</sup>

Fenomenologis merujuk pada pemahaman tentang realitas atau kesadaran yang jelas mengenai objek tertentu. Hal ini mencakup pemahaman yang mendalam tentang makna dari peristiwa serta hubungan-hubungan yang ada antara individu-individu yang terlibat dalam situasi-situasi tertentu. Untuk mencapai pemahaman semacam ini, para peneliti fenomenologis sering kali memulai dengan sikap diam dan reflektif. Mereka beranggapan bahwa kesadaran individu tidak terbentuk secara kebetulan oleh faktor-faktor eksternal yang berada di luar dirinya. Dengan demikian, fenomenologi menekankan pentingnya pengalaman subjektif dan bagaimana individu memahami dunia disekitarnya melalui lensa kesadaran mereka sendiri.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Kebijakan Kurikulum Merdeka

Kebijakan Kurikulum Merdeka yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia merupakan langkah signifikan dalam reformasi pendidikan nasional. Kurikulum ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas kepada satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik.

Pada akhir Agustus 2020, di tengah situasi yang penuh tantangan akibat Pandemi COVID-19, Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis untuk memitigasi kehilangan pembelajaran yang terjadi di seluruh wilayah. Kebijakan ini, yang dirumuskan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 719/P/2020, memberikan pilihan kepada sekolah untuk menggunakan kurikulum yang disederhanakan, atau yang sering disebut sebagai kurikulum darurat. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk memperkuat karakter dan kompetensi mendasar siswa, yang menjadi semakin penting di masa ketidakpastian ini.<sup>9</sup>

Kurikulum darurat yang diperkenalkan bertujuan untuk mengurangi beban pembelajaran bagi siswa dan guru. Dalam situasi di mana banyak siswa mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran secara daring, penyederhanaan kurikulum menjadi sangat penting. Misalnya, alih-alih mengikuti semua mata pelajaran secara lengkap, sekolah dapat memilih untuk fokus pada mata pelajaran inti seperti Matematika, Bahasa Indonesia, dan Pendidikan Pancasila. Dengan cara ini, siswa dapat

---

<sup>8</sup> "8. METODOLOGI PENELITIAN FENOMENOLOGI DAN ETNOGRAFI," n.d.

<sup>9</sup> "Kepmendikbud-Nomor-719\_P\_2020-CAP\_2," n.d.

lebih mudah memahami materi yang diajarkan dan mengurangi stres yang mungkin mereka alami akibat tuntutan akademis yang tinggi.

Untuk memperjelas situasi tersebut agar pembelajaran menjadi terarah dan terukur pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek mengeluarkan kebijakan Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran sebagai bentuk mitigasi kondisi darurat untuk pemulihan pembelajaran.<sup>10</sup> Pedoman tersebut sebagai bentuk final perubahan kurikulum sebelumnya menjadi Kurikulum Merdeka karena memperjelas bentuk struktur Kurikulum Merdeka mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai dengan Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

Setelah keluarnya Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan mengeluarkan kebijakan berbentuk Keputusan Nomor 008/H/KR/2022 Tentang Capaian Pembelajaran Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah Pada Kurikulum Merdeka.<sup>11</sup> Kebijakan tersebut merubah nomenklatur dari Kompetensi Dasar (KD) menjadi Capaian Pembelajaran (CP) dan kebijakan ini semakin memperkuat implementasi Kurikulum Merdeka sudah mulai diterapkan di satuan pendidikan masing-masing.

Perbedaan yang signifikan antara kurikulum yang telah diterapkan sebelumnya dengan Kurikulum Merdeka tidak hanya terletak pada capaian pembelajaran dan pendekatan pembelajaran yang telah mengalami sejumlah perubahan, tetapi juga mencakup struktur kurikulum itu sendiri. Dalam Kurikulum Merdeka, terdapat penambahan aspek kokurikuler, yang sebelumnya hanya terdiri dari intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Perubahan kebijakan ini telah dinyatakan secara resmi dalam Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan nomor 009/H/KR/2022, yang membahas tentang dimensi, elemen, dan subelemen yang membentuk Profil Pelajar Pancasila dalam konteks Kurikulum Merdeka. Dengan demikian, Kurikulum Merdeka tidak hanya berfokus pada aspek akademis, tetapi juga memperhatikan pengembangan karakter dan keterampilan sosial siswa melalui kegiatan kokurikuler yang terintegrasi.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> "Kemendikbudristek No.56 Ttg Pedoman Penerapan Kurikulum," n.d.

<sup>11</sup> "Keputusan Kepala BSKAP No.008HKR2022 Tahun 2022 Tentang Capaian Pembelajaran," n.d.

<sup>12</sup> "Keputusan Ka BSKAP No 9 Th 2022 Tentang Dimensi Profil Pelajar Pancasila," n.d.

Setelah memasuki tahun 2024, pemerintah Republik Indonesia secara resmi menetapkan Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum yang berlaku di tingkat nasional. Penetapan ini dilakukan karena semua satuan pendidikan di seluruh Indonesia telah siap untuk melaksanakan kurikulum tersebut. Kebijakan yang mendasari keputusan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang bernomor 12 Tahun 2024. Peraturan ini mencakup aspek kurikulum bagi Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang pendidikan dasar, serta jenjang pendidikan menengah. Dengan demikian, langkah ini menandai sebuah era baru dalam sistem pendidikan nasional yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan relevansi pembelajaran di Indonesia.<sup>13</sup>

Namun, implementasi kebijakan ini tidak tanpa tantangan. Banyak guru yang merasa kesulitan dalam mengadaptasi metode pengajaran mereka dengan kurikulum darurat. Beberapa dari mereka mungkin tidak memiliki pengalaman dalam mengajar secara daring atau menggunakan teknologi digital. Oleh karena itu, pelatihan dan dukungan bagi guru menjadi sangat penting. Pemerintah perlu memastikan bahwa semua guru mendapatkan akses ke pelatihan yang diperlukan agar mereka dapat mengimplementasikan kurikulum darurat dengan baik.

Dalam konteks Pendidikan Agama Islam (PAI), kebijakan ini memberikan peluang bagi guru untuk mengembangkan metode pengajaran yang lebih kreatif dan inovatif. Guru PAI merasa lebih bebas dalam merancang materi ajar yang sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan siswa. Namun, persepsi ini tidak selalu positif. Beberapa guru mengungkapkan kekhawatiran mengenai kurangnya panduan yang jelas dalam pelaksanaan kurikulum ini, yang dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam pengajaran.

Sebagai contoh, di SD 1 Batu Kuta Narmada, salah satu sekolah yang menerapkan Kurikulum Merdeka, guru PAI mengembangkan program pengajaran berbasis proyek yang melibatkan siswa dalam kegiatan sosial di masyarakat. Hal ini tidak hanya meningkatkan pemahaman siswa tentang ajaran Islam, tetapi juga mengajarkan mereka nilai-nilai sosial dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Namun, tidak semua guru mampu melakukan hal ini karena keterbatasan sumber daya dan pelatihan yang tidak memadai, terutama kemampuan dalam menggunakan teknologi dalam pembelajaran.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> "Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024," n.d.

<sup>14</sup>. Observasi tanggal 23 Nopember 2023

Dalam sebuah penelitian dikatakan bahwa banyak guru PAI yang belum berhasil memasukkan teknologi ke dalam bahan dan alat pembelajaran. Meskipun teknologi tidak memberikan dukungan utama untuk pembelajaran, namun itu sangat membantu dalam implementasi kurikulum mandiri yang menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada siswa daripada pembelajaran yang berpusat pada guru selama proses pembelajaran.<sup>15</sup>

Di lain pihak beberapa guru di Madrasah Ibtidaiyah merasa bahwa kebijakan Kementerian Agama dalam meningkatkan kapasitas guru-gurunya untuk memberikan pelatihan tentang kurikulum merdeka tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh Kemendikbud dengan program Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak dan diperkuat lagi dengan pendamping sekolah yakni Fasilitator Sekolah Penggerak. Program tersebut tidak berlaku bagi Madrasah Ibtidaiyah sedangkan di satu sisi guru-guru madrasah harus menerapkan kebijakan kurikulum merdeka dengan target pemahaman dan output yang sama.<sup>16</sup>

Melihat dari perspektif fenomenologi, pengalaman guru dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka sangat beragam. Beberapa guru merasa diberdayakan dan termotivasi untuk berinovasi, sementara yang lain merasa tertekan dengan tuntutan untuk menghasilkan hasil belajar yang lebih baik tanpa dukungan yang memadai. Dengan memahami persepsi guru PAI, kita dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka. Hal ini penting untuk merumuskan rekomendasi yang dapat membantu guru dalam mengatasi tantangan yang dihadapi, serta meningkatkan kualitas Pendidikan Agama Islam di pendidikan dasar.

## 2. Persepsi Guru PAI Terhadap Kebijakan Kurikulum Merdeka

Dari hasil penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, peneliti dapat menggambarkan persepsi guru PAI terhadap kebijakan Kurikulum Merdeka bervariasi, dengan beberapa guru menyambut baik perubahan ini dan yang lainnya memiliki kekhawatiran. Persepsi ini peneliti bagi menjadi dua kategori yaitu persepsi positif dan persepsi negatif.

Berikut adalah beberapa hasil penelitian yang menggambarkan persepsi guru PAI terhadap Kurikulum Merdeka.

---

<sup>15</sup> Tarbiyah et al., "Problematika Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka."

<sup>16</sup> Wildan, S.Pd.I, Guru MI Hamzanwadi, Wawancara, tanggal 27 Maret 2024

a). Persepsi Positif

1). Fleksibilitas dan kebebasan

Banyak guru Pendidikan Agama Islam merasa bahwa Kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas dan kebebasan yang lebih besar dalam merancang dan mengembangkan pembelajaran. Mereka dapat menyesuaikan materi dan metode pengajaran dengan kebutuhan dan minat siswa. Kurikulum ini memberikan ruang lebih besar untuk pengembangan karakter dan keterampilan siswa, yang dianggap penting dalam Pendidikan Agama Islam.<sup>17</sup> Kurikulum ini memungkinkan guru untuk lebih fokus pada pengembangan karakter dan nilai-nilai agama, serta mengintegrasikannya dengan konteks kehidupan sehari-hari siswa.

Begitu juga persepsi kepala sekolah menyambut baik fleksibilitas yang ditawarkan oleh Kurikulum Merdeka. Mereka merasa memiliki otonomi yang lebih besar dalam mengatur pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan potensi siswa di sekolah mereka. Fleksibilitas ini tidak hanya memberikan kebebasan dalam memilih metode pengajaran, tetapi juga memungkinkan kepala sekolah untuk merancang kurikulum yang lebih relevan dengan konteks lokal dan karakteristik siswa. Dalam hal ini, kepala sekolah berperan sebagai pemimpin yang visioner, mampu melihat potensi yang ada di dalam setiap siswa dan mengembangkan strategi pembelajaran yang dapat memaksimalkan potensi tersebut.<sup>18</sup>

Begitu juga pandangan Ustaz Nasrullah, S.Pd.I, seorang guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMPN 2 Selong, yang merasakan bahwa Kurikulum Merdeka telah memberikan ruang yang lebih luas untuk menanamkan nilai-nilai Islam serta karakter mulia pada siswa. Dalam konteks pendidikan, pengintegrasian nilai-nilai agama ke dalam kurikulum bukanlah hal yang baru, namun dengan adanya Kurikulum Merdeka, pendekatan ini menjadi lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan siswa. Ustaz Nasrullah menekankan bahwa kurikulum ini tidak hanya berfokus pada aspek akademis, tetapi juga pada pengembangan karakter dan moral siswa, yang merupakan fondasi penting dalam pendidikan. Salah satu aspek yang menarik perhatian adalah penekanan pada Profil Pelajar Pancasila, yang sejalan dengan ajaran Islam. Profil

---

<sup>17</sup>. Nirmaya Citra, S.Pd.I, Guru PAI SDN 1 Batu Kuta Narmada, Wawancara, Tanggal 23 April 2024

<sup>18</sup>. Hartono, M.Pd., Kepala Sekolah SDN 1 Batu Kuta Narmada, Wawancara, Tanggal 23 April 2024

ini mencakup berbagai karakter yang diharapkan dapat dimiliki oleh setiap pelajar, seperti beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Dalam hal ini, Ustaz Nasrullah memberikan contoh konkret bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Misalnya, dalam kegiatan ekstrakurikuler, siswa diajak untuk berpartisipasi dalam program sosial yang melibatkan masyarakat, seperti bakti sosial dan penggalangan dana untuk anak-anak yatim. Kegiatan semacam ini tidak hanya mengajarkan siswa tentang kepedulian sosial, tetapi juga memperkuat ikatan mereka dengan nilai-nilai agama yang mengajarkan tentang pentingnya berbagi dan membantu sesama.<sup>19</sup>

Lebih jauh, Ustaz Fathul Mubin guru Aqidah Akhlak di MTs. Mu'allimin NWDI Pancor Lombok Timur juga menganalisis bahwa dalam Kurikulum Merdeka, terdapat kebebasan bagi guru untuk merancang pembelajaran yang lebih kontekstual dan relevan dengan kehidupan siswa. Hal ini memungkinkan guru untuk memasukkan cerita-cerita inspiratif dari tokoh-tokoh Islam yang dapat menjadi teladan bagi siswa. Misalnya, mengisahkan tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW yang penuh dengan keteladanan dalam berperilaku dan berinteraksi dengan orang lain. Dengan cara ini, siswa tidak hanya belajar tentang teori, tetapi juga mendapatkan inspirasi untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka. Transisi antara nilai-nilai Pancasila dan ajaran Islam juga menjadi fokus dalam pembelajaran. Lebih jauh juga dikatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak bertentangan dengan ajaran Islam, melainkan saling melengkapi. Misalnya, sila pertama Pancasila, "Ketuhanan Yang Maha Esa," sejalan dengan prinsip tauhid dalam Islam. Dengan memberikan pemahaman yang mendalam tentang hal ini, siswa diharapkan dapat menghargai keragaman dan memperkuat rasa cinta tanah air mereka.<sup>20</sup>

## 2). Pengembangan karakter

Hasil wawancara dengan guru PAI di SDN 3 Banyu Urip, bahwa Kurikulum Merdeka memiliki fokus utama pada pengembangan karakter serta pembentukan profil pelajar yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

---

<sup>19</sup>. Ustaz H. Nasrullah, S.Pd.I, Guru PAI SMPN 2 Selong Lombok Timur, Wawancara, Tanggal 25 April 2024

<sup>20</sup>. Fathul Mubin, M.Pd.I, Guru Aqidah Akhlak, Wawancara, Tanggal 29 April 2024

Pendekatan ini sangat sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam ajaran agama Islam. Para guru yang mengajar Pendidikan Agama Islam merasakan bahwa adanya kurikulum ini memberikan dukungan yang signifikan bagi mereka dalam proses pembentukan siswa yang memiliki akhlak yang baik dan mulia. Melalui kurikulum ini, diharapkan para siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan akademis, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai-nilai moral dan etika yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kurikulum ini berperan penting dalam menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan berlandaskan pada ajaran agama yang baik.<sup>21</sup>

Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti merasa sangat diuntungkan dengan penerapan Kurikulum Merdeka, karena kurikulum ini lebih menekankan pada pengembangan karakter positif baik bagi peserta didik maupun para pendidik itu sendiri. Pernyataan ini disampaikan oleh salah satu Guru PAI di SDN 1 Gerimak Indah Narmada, yang menjelaskan bahwa Kurikulum Merdeka memberikan jaminan akademis yang jelas mengenai upaya penanaman nilai-nilai akhlak pada anak-anak selama mereka berada di lingkungan sekolah. Dengan demikian, kurikulum ini tidak hanya berfokus pada aspek akademis semata, tetapi juga pada pembentukan karakter yang baik, yang sangat penting untuk perkembangan moral dan etika siswa.<sup>22</sup>

### 3). Relevansi dengan kebutuhan siswa

Kurikulum Merdeka memberikan ruang bagi guru untuk mengaitkan materi pembelajaran dengan isu-isu aktual dan kebutuhan siswa. Hal ini membuat pembelajaran agama Islam menjadi lebih relevan dan menarik bagi siswa. Apalagi esensi PAI adalah aktualisasi nilai-nilai ibadah sejauhmana mampu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari baik menyangkut hubungan dengan Allah SWT maupun hubungan sosial baik semasa manusia maupun makhluk ciptaan lainnya.

Kepala SDN 3 Banyu Urip Gerung Lombok Barat menyatakan bahwa pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka menggunakan pendekatan berdisferensiasi, di mana kebutuhan siswa menjadi tolak ukur dalam

---

<sup>21</sup>. Rohana, S.Pd.I, Guru PAI SDN 3 Banyu Urip Gerung Lombok Barat, Wawancara Tanggal 1 Mei 2024

<sup>22</sup>. Lia Yulistiana, S.Pd.I, Guru PAI SDN 1 Gerimak Indah Narmada, Wawancara, Tanggal 2 Mei 2024

pembelajaran di kelas. Pendekatan ini tidak hanya mempertimbangkan tingkat kemampuan intelegensi siswa, tetapi juga gaya belajar dan karakteristik unik yang dimiliki oleh setiap individu. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana pendekatan berdisferensiasi ini diimplementasikan dan dampaknya terhadap proses pembelajaran.<sup>23</sup>

Begitu juga pandangan kepala SDN 1 Gerimak Indah Narmada menyatakan pendekatan berdisferensiasi memungkinkan pengajaran yang lebih personal dan relevan bagi siswa. Sebagai contoh, dalam kelas yang terdiri dari beragam latar belakang, seorang guru dapat menggunakan berbagai metode pengajaran untuk menjangkau semua siswa. Misalnya, untuk siswa yang lebih visual, guru dapat menggunakan gambar dan video sebagai alat bantu pengajaran. Sementara itu, siswa yang lebih kinestetik dapat diajak untuk melakukan eksperimen langsung atau praktik lapangan. Dengan cara ini, setiap siswa mendapatkan kesempatan untuk belajar dengan cara yang paling sesuai dengan gaya belajar mereka, sehingga meningkatkan pemahaman dan retensi informasi yang lebih baik.<sup>24</sup>

Jadi, pendekatan berdisferensiasi dalam Kurikulum Merdeka di sekolah-sekolah menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan memperhatikan kebutuhan siswa secara individual, mulai dari tingkat kemampuan intelegensi hingga karakteristik sosial dan emosional, pendekatan ini mampu menciptakan pengalaman belajar yang lebih relevan dan bermakna. Namun, untuk mencapai keberhasilan yang optimal, diperlukan pelatihan yang memadai bagi guru, dukungan dari pihak sekolah, serta kolaborasi yang erat dengan orang tua. Dengan demikian, diharapkan setiap siswa dapat mencapai potensi terbaik mereka dalam proses pembelajaran yang berkelanjutan.

## b. Persepsi Negatif dan Tantangan

### 1). Pelatihan dan implementasi

Beberapa guru agama Islam masih merasa kesulitan dalam memahami dan mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Mereka membutuhkan pelatihan dan pendampingan yang lebih intensif. Pernyataan ini lebih banyak diungkapkan

---

<sup>23</sup>. Saparuddin, S.Pd. Kepala SDN 3 Banyu Urip, Wawancara Tanggal 1 April 2024

<sup>24</sup>. Eramayu Ardianingsih, M.Pd. Kepala SDN 1 Gerimak Indah, Wawancara Tanggal 2 April 2024

oleh guru-guru agama Islam di madrasah yang belum memahami secara holistik bagaimana implementasi Kurikulum Merdeka diterapkan.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ustaz Fathul Mubin, M.Pd.I bahwa ada kebijakan dan perlakuan yang berbeda antara Kemendikbud dengan Kemenag dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka yang dimulia dari hulu ke hilir. Sebagai contoh Kemendikbud mempunyai kebijakan Program Sekolah Penggerak (PSP) guru-guru di sekolah tersebut mulai dari PAUD s.d SMA diberikan pelatihan dan pendampingan oleh Fasilitator Sekolah Penggerak dengan kegiatan hampir tiap bulan untuk meningkatkan kapasitas baik pengawas, kepala sekolah dan guru-gurunya. Hal ini berbeda dengan madrasah yang bernaung di bawah Kemenag kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas kepala madrasah dan guru-gurunya tidak semasih sekolah-sekolah di bawah naungan Dikbud. Hal ini tentu akan menghasilkan tingkat pemahaman dan implementasi yang berbeda terkait Kurikulum Merdeka.<sup>25</sup>

Pernyataan tersebut ada benarnya karena kalau dilihat implementasi Kurikulum Merdeka antara sekolah dan madrasah mempunyai perbedaan hal itu disebabkan kebijakan institusi masing-masing berbeda. Sehingga implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah-madrasah terkesan ikut-ikutan bahkan terpaksa.

## 2). Sumber daya dan sarana

Implementasi Kurikulum Merdeka membutuhkan sumber daya dan sarana yang memadai, seperti buku, media pembelajaran, dan teknologi. Dalam konteks pendidikan di madrasah, kurikulum ini diharapkan dapat memberikan fleksibilitas dan kebebasan bagi siswa dalam belajar, namun kenyataannya, tidak semua madrasah memiliki akses yang sama terhadap sumber daya yang diperlukan. Beberapa madrasah, terutama yang berada di daerah terpencil atau kurang berkembang, mungkin menghadapi keterbatasan yang signifikan dalam hal ini.

Hal ini diungkapkan oleh Yusdin, S.Pd.I Kepala MTs. NW Korleko bahwa sumber daya yang memadai adalah salah satu pilar utama dalam keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka. Buku pelajaran yang berkualitas, misalnya, tidak hanya harus tersedia, tetapi juga harus relevan dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman. Madrasah yang berada di daerah perkotaan

---

<sup>25</sup>. Fathul Mubin, M.Pd.I, Guru Aqidah Akhlak, Wawancara, Tanggal 29 April 2024

cenderung lebih mudah mengakses buku-buku terbaru dan materi pembelajaran yang inovatif. Sebaliknya, Madrasah di daerah pedesaan sering kali harus bergantung pada buku-buku lama yang mungkin tidak lagi sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Ini dapat mengakibatkan ketidaksesuaian antara materi yang diajarkan dan kompetensi yang diharapkan dari siswa.<sup>26</sup>

Media pembelajaran juga memainkan peran penting dalam proses belajar mengajar. Dengan adanya teknologi, seperti perangkat komputer dan akses internet, proses pembelajaran dapat menjadi lebih interaktif dan menarik. Namun, tidak semua sekolah memiliki fasilitas ini. Dalam sebuah wawancara, ditemukan bahwa banyak guru agama Islam mengeluhkan kurangnya akses terhadap media pembelajaran yang modern. Sebagaimana yang dinyatakan, "Kami ingin mengajarkan materi dengan cara yang lebih menarik, tetapi tanpa teknologi yang memadai, kami terpaksa kembali ke metode pengajaran yang konvensional."<sup>27</sup> Hal ini menunjukkan bahwa ketidakcukupan sumber daya dapat menghambat inovasi dalam pengajaran.

Keterbatasan sumber daya ini juga berdampak pada motivasi siswa. Ketika siswa tidak memiliki akses yang sama terhadap buku atau media pembelajaran yang menarik, mereka mungkin kehilangan minat dalam belajar. Dalam konteks ini, penting bagi madrasah untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Misalnya, dengan mengadakan program pertukaran buku atau kolaborasi dengan sekolah lain untuk berbagi sumber daya. Ini dapat membantu mengatasi beberapa keterbatasan yang ada dan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi siswa untuk belajar.

Di sisi lain, pemerintah dan lembaga pendidikan harus lebih proaktif dalam menyediakan sumber daya yang diperlukan. Ini termasuk pengadaan buku baru, peningkatan infrastruktur teknologi, serta pelatihan yang memadai bagi guru. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan implementasi Kurikulum Merdeka dapat berjalan dengan lebih efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi siswa.

Jadi, implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan sumber daya dan sarana yang memadai. Keterbatasan dalam akses buku, media pembelajaran, dan teknologi dapat

---

<sup>26</sup>. Yusdin, S.Pd.I, Kepala MTs. NW Korleko, Wawancara 4 April 2024

<sup>27</sup>. Sanusi, S.Ag. Guru Aqidah Akhlak MTs. NW Korleko, Wawancara Tanggal 4 April 2024

menghambat proses belajar mengajar dan memengaruhi motivasi siswa. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak, termasuk pemerintah, sekolah, dan masyarakat, untuk bekerja sama dalam menyediakan sumber daya yang diperlukan agar kurikulum ini dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi pendidikan di Indonesia.

### 3). Implementasi pembelajaran berdiferensiasi

Pembelajaran berdiferensiasi pada dasarnya adalah suatu pendekatan dalam proses belajar mengajar yang mengakui dan menghargai perbedaan antara setiap siswa. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman bahwa setiap individu memiliki karakteristik, kebutuhan, dan gaya belajar yang unik, serta bahwa mereka beradaptasi dan berubah seiring waktu. Oleh karena itu, dalam konteks pendidikan, penting untuk merancang pengalaman belajar yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan tersebut, agar setiap siswa dapat meraih potensi terbaik mereka. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan responsif, di mana setiap siswa merasa dihargai dan didukung dalam perjalanan belajarnya.

Menurut Marlina, Pembelajaran berdiferensiasi terdiri dari empat komponen utama yang saling berkaitan, yaitu: isi, proses, produk, dan lingkungan belajar.

1. Komponen isi merujuk pada materi atau konten yang diajarkan kepada siswa. Dalam konteks pembelajaran berdiferensiasi, isi ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan masing-masing siswa. Hal ini bertujuan agar setiap siswa dapat mengakses materi dengan cara yang paling efektif bagi mereka, sehingga proses belajar menjadi lebih bermakna.
2. Komponen proses berkaitan dengan cara siswa berinteraksi dengan isi yang telah disediakan. Proses ini mencakup metode dan strategi yang digunakan oleh guru untuk mengajarkan materi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat mengadaptasi pendekatan pengajaran mereka agar sesuai dengan gaya belajar yang berbeda-beda dari siswa. Dengan demikian, setiap siswa memiliki kesempatan untuk belajar dengan cara yang paling sesuai dengan mereka, baik melalui diskusi, proyek, maupun kegiatan praktis.
3. Komponen produk, yang merupakan hasil akhir dari proses pembelajaran. Produk ini dapat berupa tugas, proyek, atau penilaian yang menunjukkan pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan. Dalam pembelajaran

berdiferensiasi, produk ini juga dapat disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan minat siswa. Dengan memberikan pilihan pada siswa tentang bagaimana mereka ingin menunjukkan pemahaman mereka, guru dapat mendorong kreativitas dan keterlibatan siswa dalam proses belajar.

4. Komponen lingkungan belajar mencakup suasana dan kondisi di mana pembelajaran berlangsung. Lingkungan belajar yang mendukung sangat penting dalam pembelajaran berdiferensiasi. Ini termasuk pengaturan fisik ruang kelas, serta aspek emosional dan sosial yang mempengaruhi interaksi antara siswa dan guru. Lingkungan yang positif dan inklusif akan membantu siswa merasa aman dan termotivasi untuk belajar, sehingga mereka dapat mencapai potensi mereka secara maksimal.<sup>28</sup>

Hal serupa juga dikatakan oleh Dinar bahwa anak-anak yang berusia serupa dan berangkat ke sekolah secara bersamaan, tidak selalu memiliki kesamaan dalam ukuran tubuh, hobi, kepribadian, serta kesukaan atau ketidaksukaan. Kemampuan mereka pun bervariasi; ada yang sudah menguasai banyak hal, sementara yang lainnya mungkin masih belum memahami apapun.<sup>29</sup>

Kenyataan dilapangan ternyata tidak seindah teori yang ada dalam melaksanakan pembelajaran berdisferensiasi, hal ini juga diungkapkan oleh guru PAI di MTs. NWDI Pancor Ustaz, Damanhuri bahwa sulitnya menerapkan pembelajaran berdisferensiasi adalah jumlah siswa yang terlalu banyak di kelas sehingga sulit mengelompokkan berdasarkan jenis kemampuan dan tipologi belajarnya dan juga keterbatasan waktu sehingga sulit bagi guru merancang pembelajaran berdisferensiasi yang efektif.<sup>30</sup>

Begitu juga bagi guru di SDN 3 Banyu Urip bahwa implementasi pembelajaran berdisferensiasi memerlukan adaptasi yang lama karena beberapa hal yaitu kesiapan guru untuk memahami ini dengan baik, karena konsep disferensiasi tidak berdiri sendiri melainkan ia harus terintegrasi dengan pemahaman guru tentang asesmen dan jika keduanya sudah dipahami dengan baik barulan pembelajran berdisferensiasi efektif terlaksana.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup>. S Marlina, "Panduan Pelaksanaan Model Pembelajaran Berdiferensiasi Di Sekolah Inklusif," n.d.

<sup>29</sup>. Dinar Westri Andini Pendidikan Guru Sekolah Dasar, "Differentiated Instruction: Solusi Pembelajaran Dalam Keberagaman Siswa Di Kelas Inklusif," n.d.

<sup>30</sup>. Ustaz Damanhuri, S.Pd.I, Guru Aqidah Akhlak MTs. NWDI Pancor, Wawancara 7 April 2024

<sup>31</sup>. Saparuddin, S.Pd. Kepala SDN 3 Banyu Urip Gerung Lobar, Wawancara, Tanggal 3 April 2024

**Kesimpulan:**

1. Secara umum, persepsi guru agama Islam terhadap Kurikulum Merdeka cenderung positif, terutama terkait dengan fleksibilitas, pengembangan karakter, dan relevansi dengan kebutuhan siswa.
2. Namun, masih ada tantangan yang perlu diatasi, seperti pemahaman dan implementasi kurikulum, ketersediaan sumber daya, dan adaptasi terhadap perubahan.
3. Pemerintah dan pihak terkait perlu memberikan dukungan dan pendampingan yang memadai bagi guru agama Islam dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka.

## Daftar Pustaka

- Fauzi, Muhammad Noor. "Problematika Guru Mengimplementasi Kurikulum Merdeka Belajar Pada Pembelajaran PAI Di Sekolah Dasar." *Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah* 7, no. 4 (25 Oktober 2023): 1661. <https://doi.org/10.35931/am.v7i4.2688>.
- Hasan, A. "Budaya Sekolah dan Implementasi Kurikulum: Analisis pada Sekolah Menengah di Indonesia." *Jurnal Manajemen Pendidikan* 10, no. 3 (2021): 67-78.
- Jurnal Pendidikan dan Konseling. "Adaptasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Di Sekolah Dasar." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Kepmendikbud Nomor 719/P/2020/CAP/2."
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. "Kepmendikbudristek No. 56 Ttg Pedoman Penerapan Kurikulum."
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. "Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024."
- Keputusan Kepala BSKAP No. 008/HKR/2022 Tahun 2022 Tentang Capaian Pembelajaran."
- Keputusan Kepala BSKAP No. 9 Th 2022 Tentang Dimensi Profil Pelajar Pancasila."
- Marlina, S. "Panduan Pelaksanaan Model Pembelajaran Berdiferensiasi di Sekolah Inklusif."
- Konferensi Nasional Tarbiyah. "Problematika Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka." 2023.
- Metodologi Penelitian Fenomenologi dan Etnografi."
- Mulyasa, E. "Kesiapan Guru dalam Implementasi Kurikulum Merdeka: Tinjauan dari Perspektif Pendidikan Agama." *Jurnal Pendidikan* 15, no. 2 (2021): 123-135.
- Sari, R. "Fenomena Resistensi Guru terhadap Perubahan Kurikulum: Studi Kasus di Sekolah Menengah Pertama." *Jurnal Ilmu Pendidikan* 18, no. 1 (2022): 45-58.
- Tarbiyah. "Problematika Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka."